

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN KERJA SAMA  
INVESTASI PENANAMAN MODAL DAN BENTUK PERLINDUNGAN  
HUKUM BAGI INVESTOR (STUDI KASUS DEWANTO ADI SAPUTRA  
DENGAN PT.X)**

Fa'iz Muhammad Ikhsan<sup>1</sup>, Wahyu Adi Mudiparwanto<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Investasi kunci bagi perkembangan ekonomi suatu negara, menarik minat investor dengan kemudahan pemerintah. Investasi ciptakan lapangan kerja, tingkatkan pendapatan, turunkan pengangguran, naikan PDB. Banyak pilihan investasi di Indonesia, seperti saham, cryptocurrency, obligasi, dan reksadana. Investasi bisa kooperatif, seperti properti. Perjanjian adalah tindakan dua pihak atau lebih setuju hukumnya. Perjanjian kerjasama umum di Indonesia, mengikuti peraturan dan etika. Investor, yang masukkan modal ke perusahaan, butuh perlindungan hukum. Analisis yuridis perjanjian investasi penting untuk atasi masalah dan risiko perselisihan. Contoh kasus perjanjian PT. X dan Dewanto Adi Saputra melanggar pasal 1338 KUHPerdara. Tindak wanprestasi (ketidakpenuhi kewajiban) diinvestasi butuh perlindungan.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Hukum YSW & Partner dengan metode penelitian normatif-empiris dimana dalam penelitian ini pengambilan datanya berdasarkan data hasil observasi, wawancara, dan studi kepustakaan yang dioleh untuk mengetahui bagaimana keadaan di lapangan.

Dalam perjanjian investasi PT. X dan Dewanto Adi Saputra, dari 6 kerjasama, 3 sengketa akibat wanprestasi PT.X. Dalam kerjasama ke-4, ke-5, dan ke-6, wanprestasi termasuk janji tak sesuai kesepakatan dan keterlambatan. Perlindungan hukum bagi investor meliputi UU Nomor 25/2007, klausul perjanjian, penyelesaian sengketa, serta peran pemerintah. Sengketa antara Dewanto dan PT. X dapat diatasi dengan mediasi sebagai perlindungan bagi investor.

Terhadap masyarakat yang ingin melakukan investasi terkait penanaman modal dapat mempelajari terlebih dahulu mulai dari bagaimana mekanisme investasi penanaman modal, bagaimana pengaturan hukumnya, hingga bagaimana profil dari tempat akan dilakukan investasi penanaman modal tersebut. Terhadap pemerintah terkait perlindungan hukum bagi investor dapat meningkatkan kualitas dari aparat penegak hukum agar dapat memberikan perlindungan lebih baik lagi kepada investor yang telah melakukan investasi penanaman modal.

Kata kunci: Penanaman Modal, Perjanjian Kerja Sama, Wanprestasi.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Prodi Hukum, Universitas Jendral Achmad Yani Yogyakarta

<sup>2</sup> Dosen Prodi Hukum, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

**ANALYSIS OF THE INVESTMENT COOPERATION AGREEMENT AND  
THE FORM OF LEGAL PROTECTION FOR INVESTORS (A CASE  
STUDY OF DEWANTO ADI SAPUTRA WITH PT.X)**

Fa'iz Muhammad Ikhsan<sup>1</sup>, Wahyu Adi Mudiparwanto<sup>2</sup>

**ABSTRACT**

*Investment is key to a country's economic development and attracting investors through government facilities. Investment creates jobs, increases income, lowers unemployment, and increases GDP. There are many investment options in Indonesia, such as stocks, cryptocurrencies, bonds, and mutual funds. Investments can also take the form of cooperatives, such as property investments. An agreement is a pact between two or more parties that involves a legal commitment. Cooperation agreements are common in Indonesia, and are bound by regulations and ethics. Investors who inject capital into a company need legal protection. A juridical analysis of the investment agreement is important to address issues and reduce the risk of disputes. For example, the agreement between PT X and Dewanto Adi Saputra violates Article 1338 of the Civil Code due to breach of contract (non-fulfillment of obligations), highlighting the need for investment protection.*

*This research was conducted at YSW & Partners Law Office using normative-empirical research method. Data collection for this research was carried out by means of observation, interviews, and literature study. These methods are used to understand the practical aspects in the field.*

*In the investment agreement between PT.X and Dewanto Adi Saputra, out of 6 collaborations, there were 3 disputes caused by PT.X's default. In the 4th, 5th, and 6th cooperation, defaults made include promises that are not in accordance with the agreement and result in delays. Legal protection for investors includes Law No. 25/2007, agreement clauses, dispute resolution mechanisms, and the role of the government. The dispute between Dewanto and PT X can be resolved through mediation which serves as protection for investors.*

*For individuals interested in investing, it is important to first learn about the various aspects of the investment process. This includes understanding the investment mechanism, legal arrangements, and even the profile of the chosen investment location. On the other hand, the government can enhance investor protection by improving the quality of law enforcement officers. These improvements will ultimately result in better protection for investors who have committed to investment opportunities.*

**Keywords:** *Investment, Cooperation Agreement, breach of contract.*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Prodi Hukum, Universitas Jendral Achmad Yani Yogyakarta

<sup>2</sup> Dosen Prodi Hukum, Universitas Jendral Achmad Yani Yogyakarta